

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa selalu identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografi dan topografi desa yang jauh dari perkotaan. Terbatasnya mata pencaharian masyarakat desa menjadikan desa semakin jauh dari kesejahteraan. Desa merupakan suatu daerah dimana biasanya konflik berkepanjangan senantiasa terjadi. Konflik yang berkepanjangan pada akhirnya mengakibatkan banyaknya sumber-sumber dasar (*the resource base*) dan kapabilitas masyarakat (*people's capabilities*) menjadi rusak/tergedrasi.

Berdasarkan sumber data Kementrian Dalam Negeri yang terdapat di dalam Permendagri No. 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrai Pemerintahan, Jumlah Desa seluruhnya di Indonesia mencapai sekitar 74.754 buah, jumlah penduduk tiap desa sekitar 45% dari total jumlah penduduk Indonesia. Wilayah pedesaan sangat luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan sangat rendah, dan dalam memperoleh informasi sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia

perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin (Mubarak, 2010). Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan yang tepat adalah pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah yaitu pembangunan yang dimulai dari tingkat terkecil seperti desa. Aprilia dkk (2014: 29) mengemukakan bahwa, pembangunan dari atas (*top-down*), menempatkan pemerintah pusat dan atau elit masyarakat sebagai pencetus gagasan, dengan asumsi mereka tahu yang terbaik bagi masyarakatnya, tanpa harus mendengarkan atau mengakomodasi aspirasi masyarakat (bawah). Dalam hal ini, masyarakat (bawah) dilibatkan atau dimobilisasi dengan memberikan intensif dan atau menumbuhkan rasa takut. Sebaliknya, pembangunan dari bawah (*bottom-up*) memberikan kesempatan kepada masyarakat (bawah) untuk berinisiatif sejak perencanaan, dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta cara-cara terbaik yang cocok dengan kondisi mereka.

Dalam mendukung pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan Undang-undang desa dan regulasi yang mengatur tentang Dana Desa, adapun

Undang-undang tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan regulasi tentang Dana Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang desa yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang diubah lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

Adanya Dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Hal ini menjadikan desa-desa yang mendapat penyaluran Dana desa agar lebih memajukan desanya dan menjadikan pembangunan desa tidak kalah dengan pembangunan perkotaan khususnya dalam hal infrastruktur desa.

Dalam memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan dikembangkan Indeks Desa Membangun yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 desa dan Meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) memandang prakarsa dan kuatnya masyarakat desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa yang di dalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang lekat dengan budaya dan karakteristik desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam lima (5) status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan.

Kalimantan Timur memiliki 2951 desa. Terdiri dari 7 Desa Maju (0,24%), 274 Desa Berkembang (9,3%), 2206 Desa Tertinggal (74,8%), dan 464 Desa Tertinggal (15,7%). Tidak ada desa yang berstatus Mandiri di Kalimantan Timur termasuk di Kabupaten Kutai Timur. Nilai IDM rata-rata adalah 0,525.

Dengan kondisi tersebut menempatkan Provinsi Kalimantan Timur dalam IDM terendah ke-7 di seluruh Indonesia, dan masih jauh di bawah nilai IDM rata-rata Nasional (0,566)

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi 5 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 133 desa. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km<sup>2</sup> atau sekitar 24% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbanyak ketiga di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Dilihat dari masih banyaknya penduduk miskin yang ada di kabupaten Kutai Timur, maka pemerintah daerah mengutamakan pembangunan yang dimulai dari desa. Adanya Pembangunan perdesaan ini agar terciptanya kemandirian daerah yang dapat menciptakan masyarakat desa yang mandiri

Pembangunan desa yang dilaksanakan pada seluruh desa di Indonesia belum didasarkan pada suatu acuan baku berupa Standar Pelayanan Minimal Desa (Bappenas, 2014). Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) merupakan hak masyarakat desa terhadap pelayanan-pelayanan sebagai warga yang harus disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa di desa

Untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa, maka desa dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu : Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Desa Mandiri adalah Desa yang telah terpenuhi SPM Desa yang mencakup beberapa aspek yaitu : kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan. Desa Berkembang adalah desa yang sudah terpenuhi SPM desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan. Desa Tertinggal adalah desa yang belum terpenuhi SPM desa pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Kutai Timur memiliki 133 desa, dari 133 desa tersebut 23 desa masih berstatus desa tertinggal, 106 desa masuk kategori berkembang, dan 4 desa status mandiri. Banyaknya desa yang memiliki kategori desa tertinggal membuat pemerintah daerah ingin menjadikan desa tertinggal tersebut menjadi desa yang berkembang, selanjutnya desa yang berkembang menjadi desa yang mandiri.

Munculnya permasalahan pada masih banyaknya desa tertinggal di Kabupaten Kutai Timur, membuat Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 merumuskan Visi dan Misi kepemimpinan dengan memunculkan Program Pembangunan Desa Mandiri dan Tertinggal, program ini juga dimasukkan di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021. Adanya program tersebut juga untuk melaksanakan NAWACITA ketiga Presiden Republik Indonesia yaitu Jokowi-Jusuf Kalla. Pada NAWACITA ketiga telah dimandatkan untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Dari NAWACITA tersebut membuat Kabupaten Kutai Timur untuk merubah paradigma pembangunan menjadikan masyarakat menjadi subyek pembangunan bukan obyek dan menciptakan Desa Membangun untuk mencapai kemandirian desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 ?
- 2) Bagaimana keberhasilan pembangunan Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui keberhasilan Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat Teori

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan keilmuan di bidang pembangunan khususnya persepsi masyarakat terhadap pembangunan Desa mandiri dan terpadu.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang Program Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) di Kabupaten Kutai Timur.

#### b) Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada kegiatan penelitian berikutnya mengenai persepsi masyarakat dalam Program Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu di Kabupaten Kutai Timur.



2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang Program Pembangunan Gerakan Desa Mandiri dan Terpadu di Kabupaten Kutai Timur.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Dalam menyusun kerangka dasar teori diperlukan pengertian dari teori itu sendiri, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi teori. Sitirahayu Haditoni (1999), menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada.

### **1. Pengertian Persepsi**

Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan esktern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada dasarnya mengandung makna yang sama Miftah Thoha, 2009: 140). Menurut Sugihartono (2007:8), persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain (Bimo Walgito, 2004:70).

Hal yang sama juga dipaparkan mengenai pengertian persepsi menurut Luthans yang di kutip oleh Miftah Thoha (1999: 125) persepsi itu adalah lebih kompleks dan luas kalau dibandingkan dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Perbedaan antara persepsi dan penginderaan menurut Luthans yang di kutip oleh Miftah Thoha (1999: 125) sebagai berikut:

1. Bagian pembelian membeli peralatan yang diperkirakan menurutnya adalah peralatan yang terbaik, tetapi para insinyur menyatakan bahwa itu bukanlah peralatan yang terbaik.

2. Seseorang bawahan menjawab suatu pertanyaan berdasarkan atas apa yang ia dengar dari atasannya, bukannya apa yang senyatanya dikatakan atasannya.
3. Pekerja yang sama mungkin dilihat oleh satu pengawas sebagai pekerja yang terbaik, dan oleh pengawas yang lain dikatakan yang terjelek.
4. Dagangan rambut palsu (*wig*) dinilai oleh penjual mempunyai nilai kualitas yang tinggi, tetapi pembeli mengatakan mempunyai kualitas yang rendah.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, atau ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi disekitarnya (Waidi, 2006:118).

Lebih lanjut menurut Jalaludin Rakhmat (2003:51), persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

**a. Syarat terjadinya persepsi**

Menurut Sunaryo (2004:98), syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya objek yang dipersepsi.
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

**b. Faktor yang mempengaruhi persepsi**

Menurut Miftah Thoha (2009:154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

Perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

b. Faktor eksternal

Latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Menurut Bimo (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu:

a) Objek yang di persepsi

Objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

b) Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

c) Perhatian

Untuk meyakini atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek dan stimulus. Persepsi seseorang atau kelompok dapat berbeda jauh dengan persepsi orang atau kelompok lain meskipun dalam situasi yang sama.

**c. Proses persepsi**

Proses terbentuknya persepsi di dasari pada beberapa tahapan, yaitu :

a. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi di awali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara

pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang (Miftah Thoha, 2009: 145).

## **2. Pengertian Pembangunan**

Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan” (Aprillia dkk, 2014: 1). Pembangunan, dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sebagai terjemahan atau padanan istilah: *development, growth, and change, modernization* atau bahkan juga *progress* (Rahardjo, 1980).

Dalam istilah pembangunan semuanya akan selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki arah positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia secara individual maupun bagi masyarakatnya (Hadad, 1980). Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, tetapi Goulet (Todaro, 1981) mengemukakan ada tiga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-

kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan-dasar, keamanan, rekreasi, dll.

- b. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu-hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.

Maka secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut (Mardikanto, 2009).

#### **a. Bentuk-bentuk Pembangunan**

- 1) Pembangunan Fisik



Menurut Muljana (2001: 3) pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik, dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Agenda kebijakan di definisikan sebagai tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Maka agenda kebijakan dapat di bedakan dari tuntutan politik secara umum serta dengan istilah “prioritas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok agenda.

Menurut Barbara Nelson dalam Winarno (2007: 80) menyatakan, bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Dengan demikian, agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

## 2) Pembangunan Non Fisik

Dalam pembangunan suatu wilayah tentunya bukan hanya mengutamakan pembangunan fisik saja, tetapi diperlukan adanya pembangunan yang berbentuk non fisik agar pembangunan di suatu daerah dapat merata atau tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian

pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan (Bachtiar, 2002: 114).

### **3. Pembangunan Desa**

Pembangunan adalah proses perubahan yang sengaja dan direncanakan lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki (Simandjuntak, 1986). Menurut Rahadjo (2006: 3) Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Dalam pembangunan desa, Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan (Rahardjo, 2006: 11).

Istilah pembangunan umumnya dikenal dengan istilah *development*, sekalipun istilah *development* berarti perkembangan tanpa perencanaan.

Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut dengan *rural development*. Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka meingidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada yang menngartikan pula bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat (Rahardjo, 2006: 12).

Beratha (1991: 48) mengemukakan Pembangunan masyarakat diartikan sebagai suatu proses, metode, program, kelembagaan, dan gerakan yang mencakup :

- 1) Mengikutsertakan masyarakat sebagai basis dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama.
- 2) Mendidik dan melatih masyarakat dalam proses demokrasi untuk mengatasi masalah secara bersama.
- 3) Mengaktifkan kelembagaan serta menyediakan fasilitas untuk transfer teknologi kepada masyarakat.

Menurut Rahardjo (2006: 30) Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya.
- b. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal.
- c. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

**a. Azas Pembangunan Desa**

Meskipun pembangunan desa selalu menjadi fokus perhatian pemerintah sejak kemerdekaan Indonesia, namun azas dan strategi pembangunan desa seringkali mengalami perubahan. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya, dengan pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang tangguh diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang mampu berswasembada. Pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan tiga azas, yaitu (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, dan (3) azas pemufakatan bersama.

Pertama, azas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dilihat dari semua segi masyarakat desa yang meliputi sektor-sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya,

sehingga menjamin perkembangan yang selaras, seimbang dan tidak berat sebelah.

Kedua, azas kekuatan sendiri adalah tiap usaha harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, artinya tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah.

Ketiga, azas pemufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan pada bidang atau sektor yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan bagi masyarakat desa yang bersangkutan (Rahardjo, 2006: 18).

#### **b. Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa**

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (terbuka), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*).

Pembangunan itu pada dasarnya dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu perlibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Rahardjo (2006: 17) mengemukakan Pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif,

berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga optimalitas.

Tiga prinsip pokok pembangunan desa:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor dan antar sektor di setiap daerah, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulas, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

### **c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa**

Rahardjo (2006: 23) mengemukakan, pada dasarnya tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa

melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*improving quality of life*).

Sedangkan sasaran umum dari pembangunan desa adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (*agricultural resource based*) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus berikut:

- a) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah.
- b) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- c) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk

menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi (Rahardjo, 2006: 24).

## **F. Definisi Konseptual**

Fokus dalam penelitian ini ialah konsep persepsi masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan, sehingga definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Persepsi**

Teori terkait persepsi yang dikemukakan oleh ahli yang sesuai dengan penelitian ini yaitu menurut Miftah Thoha (2009: 140), Sugihartono (2007: 8), dan Luthans (dalam Miftah Thoha, 1999: 125). Persepsi adalah penilaian seseorang terhadap sesuatu dari sudut pandang mereka. Pandangan seseorang terhadap yang mereka lihat dengan yang orang lain lihat tentunya berbeda atau tidak sama, hal tersebut dapat dikatakan sebagai persepsi.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, faktor ini diperoleh dari perasaan, sikap dan kepribadian individu, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), dan proses belajar. Sementara itu, faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh orang



lain dan lingkungannya berupa latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, dan hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini penting digunakan untuk melihat masyarakat dalam memberikan persepsi terhadap Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu).

## **2. Pembangunan**

Teori terkait pembangunan yang dikemukakan oleh ahli yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu menurut Aprillia (2014: 1), Rahardjo (1980), Muljana (2001: 3), Winarno (2007: 80), dan Bachtiar (2002:4). Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya. Pembangunan tentunya bertujuan untuk melakukan perubahan dan mengarah ke suatu yang positif.

Pengukuran keberhasilan pembangunan dalam penelitian ini dilihat dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik yaitu pembangunan yang bersifat infrastruktur dan prasarana. Sementara itu, pembangunan non fisik yaitu pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

## **G. Definisi Operasional**

## **1. Persepsi Masyarakat**

1. Persepsi masyarakat terhadap kesesuaian pembangunan di Desa dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
2. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah.
3. Persepsi masyarakat terhadap sikap pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi pembangunan di Desa.
4. Persepsi masyarakat terhadap informasi yang diterima dari pemerintah daerah tentang Program Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu).
5. Persepsi masyarakat terhadap program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah daerah dalam pembangunan Desa.
6. Persepsi masyarakat terhadap sosialisasi pemerintah daerah tentang Program Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu).

## **2. Keberhasilan Pembangunan**

### **a) Pembangunan Fisik**

1. Pembangunan infrastruktur ekonomi desa.
2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

### **b) Pembangunan Non Fisik**

1. Penanganan kesehatan masyarakat desa.

2. Pengembangan pendidikan di desa.
3. Kualitas sumber daya manusia.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015: 207).

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan memahami Persepsi Masyarakat terhadap Program Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) yang sedang berjalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

### **3. Unit Analisis**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kabupaten Kutai Timur yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur sebagai objek penelitian. Penulis memilih Kabupaten Kutai Timur karena Program Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu) sedang berjalan di Kabupaten Kutai Timur sebagai Visi dan Misi Bupati tahun 2016-2021.

#### **4. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait mengenai persepsi masyarakat terhadap Program Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016. Data-data yang akan diperoleh peneliti yaitu berasal dari masyarakat Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri yang berada di Kabupaten Kutai Timur.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari buku-buku, artikel, jurnal, rujukan skripsi terdahulu, dan dari sumber internet yang berkaitan dengan informasi penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh peneliti melalui (1) Jurnal online, (2) Artikel, (3) Buku-buku terkait dengan Pembangunan Desa dan Persepsi Masyarakat, (5) Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Undang-undang yang berlaku, dan (6) Berita online.

#### **5. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015: 117).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 413.508 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik Simple Random Sampling yaitu sampel yang diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2015:120). Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, akan digunakan Teknik Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = N / N (d)^2 + 1$$

Keterangan :

n = besarnya ukuran sampel

N = populasi

d = presisi yang diinginkan untuk diambil “10%”.

Populasi Kabupaten Kutai Timur 413.508 jiwa.

$$N = n / n (d)^2 + 1$$

$$N = 413.508 / 413.508 (0,1)^2 + 1$$

$$= 413.508 / 4.136$$

$$= 99.97 \text{ orang dibulatkan menjadi } 100 \text{ orang.}$$

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu sebagai berikut:

### **a. Kuesioner (Angket)**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2015: 199).

## **7. Teknik Analisa Data**

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari masyarakat tentang persepsi masyarakat terhadap program gerakan pembangunan Desa mandiri dan terpadu di Kabupaten Kutai Timur. Adanya kuesioner adalah untuk mengumpulkan sejumlah pertanyaan tertulis kemudian akan dijawab secara tertulis oleh responden. Kuesioner yang digunakan yaitu berbentuk skala lima tingkat (*Likert*).

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$P = f/n * 100\%$$

Dimana :

P = Prosentase

f = Frekuensi atau banyaknya jawaban

n = Jumlah responden

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistik deskriptif. Teknik analisis data yang berpangkal pada peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau yang dapat dinyatakan dengan angka (skala, indeks, rumus dan sebagainya). Sedangkan untuk menyimpulkan data yang diperoleh dari kuesioner menggunakan skala indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{1.F1 + 2.F2 + 3.F3 + 4.F4 + 5.F5}{N}$$

Keterangan:

I : Indeks

F : Frekuensi sampel/sub sampel

N : Jumlah sampel

1 : Kategori tidak baik

2 : Kategori kurang baik

- 3 : Kategori baik
- 4 : Kategori sangat baik
- F1 : Sangat tidak baik
- F2 : Tidak baik
- F3 : Kurang Baik
- F4 : Baik
- F5 : Sangat Baik

Untuk perhitungan interval dari nilai-nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Interval} & : \frac{\text{Nilai tertinggi-Nilai terendah}}{\text{Banyaknya kriteria}} \\ & = \frac{5-1}{5} \\ & = 0,80 \end{aligned}$$

Keterangan:

- 4,21 – 5,00 : Sangat Baik
- 3,41 – 4,20 : Baik
- 2,61 – 3,40 : Cukup Baik
- 1,81 – 2,60 : Kurang Baik
- 1,00 – 1,80 : Buruk